



Buletin Parlementaria



4 Distribusi Pupuk yang Sederhana untuk Kedaulatan Pangan



5 Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB, Jika Perlu Dihapus

Bea Cukai Harus Tingkatkan Pengawasannya



Nomor 1323/IV/XII/2024 Desember 2024



9 772614 339005



Bea Cukai Harus Tingkatkan Pengawasannya



FOTO: SAKITRI/ANSA

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dalam melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas manusia dan barang di pintu-pintu masuk Indonesia, terus mengalami peningkatan signifikan. Pasca pandemi Covid-19 Ditjen Bea Cukai, menurutnya, telah mampu menunjukkan pemulihan dan kinerja yang sesuai harapan

“Saya dulu ke sini pada saat pelayanan di masa Covid-19, kita tahu situasi seperti apa, dan sekarang sudah kembali normal, relaksasi berjalan dan mereka (Bea Cukai) memiliki peningkatan yang luar biasa,” ucap

Misbakhun usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/11).

Hal itu menjadi perhatian Komisi XI DPR terlebih Ditjen Bea Cukai adalah salah satu instansi pemerintah yang menarik perhatian publik. Ini tak lepas dari persoalan tarif bea masuk, kegagalan penyelundupan barang ilegal, cukai rokok *ilegal*, soal IMEI. Ditambah lagi Ditjen Bea Cukai turut mengambil peran dalam persoalan terkait cekal pelaku tindak pidana, dan sebagainya.

Selain itu, Misbakhun menekankan pentingnya kesinergisan dan komunikasi yang baik antara Ditjen

Bea Cukai dengan *stakeholder* terkait sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih cepat. Tak hanya itu, menurutnya, dukungan peningkatan alat penunjang bagi Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap manusia dan barang di pintu-pintu masuk Indonesia.

“Kalau menurut saya standarnya sudah *following* (mengikuti) ke standar internasional. Memang ada peralatan seperti X-Ray, tetapi saya melihat sudah memenuhi kapasitas, walaupun pada tingkat *peak*-nya itu juga masih butuh penambahan,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

— **srw/rdn**





Biro Pemberitaan Parlemen

Ajak Masyarakat Digital Jadi Keluarga Besar Parlemen



FOTO: MANY/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam foto bersama usai mengikuti acara kolaborasi media sosial bertajuk Lokakarya Akamsi Jawa Barat (Aksi Kreator Masa Kini) di Bandung.

Dalam rangka memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat digital, DPR RI menggelar acara kolaborasi media sosial di Bandung, Kamis (21/11). Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, ini bertujuan mendukung *Open Parliament Indonesia* dengan menekankan pentingnya keterbukaan, edukasi, dan inklusivitas di era digital.

Dalam sambutannya, Cucun mengajak masyarakat digital—termasuk kreator konten, *influencer*, dan *blogger* untuk menjadi bagian dari keluarga besar DPR RI. Ia menekankan bahwa sinergi ini penting agar informasi mengenai kerja DPR dapat tersampaikan secara luas dan edukatif kepada masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat digital untuk menjadi keluarga besar DPR. Dengan kolaborasi ini, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah memahami fungsi-fungsi DPR RI, seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran, melalui konten yang kreatif dan edukatif,” ujar Cucun.

Ia juga menyoroti tantangan di era digital, termasuk penyebaran *hoaks* dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi. “Media sosial harus menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, bukan justru menghambat. Oleh karena itu, kami mengundang masyarakat digital untuk bersama-sama menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat,” ujarnya. **ssb/aha**



- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- KETUA PENGARAH**
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- WAKIL PENGARAH**
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)
- WAKIL PIMPINAN REDAKSI**
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)
- REDAKTUR**
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen
- REDAKTUR FOTO**
M. Andri Nurdiansyah
- SEKRETARIS REDAKSI**
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.S
- ANGGOTA REDAKSI**
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nafhen Ivan, S.I.Kom,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Saveria Sa'diyah, S.I.Kom,
Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi
Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani,
Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,
Balgys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfiakar Mubien,
Yasmin Nabila
- FOTOGRAFER**
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri
- INFOGRAFIS**
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri
- ADMINISTRASI**
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto
- PENERBITAN**
- PIMPINAN PENERBITAN**
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)
- DESAIN GRAFIS**
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom
- IT MEDIA DIGITAL**
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E,
Indah Ekawati, S.I.Kom.
- PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**
M. Chaiudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Zulfikar, S.A.B.
- ADMINISTRASI**
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
- Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Distribusi Pupuk yang Sederhana untuk Kedaulatan Pangan

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan pentingnya peran PT Petrokimia Gresik dalam mendukung kedaulatan pangan melalui distribusi pupuk yang lebih sederhana dan efisien kepada petani. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (22/11).

"Pemerintah kita hari ini fokus pada ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan. Saya lebih setuju menggunakan istilah kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Peran Petrokimia atau Pupuk Indonesia (PI) secara keseluruhan sangat penting. Selama ini, mereka telah lama mendampingi para petani," tutur Anggia saat ditemui **Parlementaria**.

Menurut politisi Fraksi PKB ini, meskipun ketersediaan pupuk sudah

mencukupi, masih ada tantangan besar dalam memastikan distribusinya berjalan lancar hingga ke tangan petani. Ia menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem distribusi pupuk, terutama dalam mengatasi kerumitan alur distribusi yang saat ini melibatkan banyak lapisan.

"Hal yang perlu diperhatikan adalah, jika ketersediaan ada, tetapi alur distribusi pupuk sampai ke petani ini yang harus terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki, sehingga masyarakat, terutama petani kecil, bisa mengaksesnya dengan mudah sesuai prinsip 4 tepat. Tepat sumber pupuk, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat waktu," ujar legislator Dapil Jawa Timur VI itu.

Anggia menjelaskan bahwa proses distribusi pupuk saat ini masih melalui berbagai tahapan seperti distributor, kios, koperasi, serta lini distribusi lainnya. Hal ini, menurutnya, perlu disederhanakan untuk mempermudah akses petani. **uc/aha**



FOTO: LUCKA/PDT

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, bersama tim dalam foto bersama saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB, Jika Perlu Dihapus



FOTO: OQ/PDT

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, saat mengikuti pertemuan dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kota Bandung.

Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengkaji ulang secara serius sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya jalur zonasi, dengan kemungkinan untuk dihapus. Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menilai sistem zonasi dalam PPDB lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat.

“Komisi X DPR RI meminta agar sistem zonasi benar-benar dikaji, kalau perlu dihapus. Kekurangannya yang pertama, aparat pendidikan yang terlibat tidak siap. Kedua, potensi kecurangan tidak dapat dihindari, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ketiga, langkah-langkah ceroboh

menyebabkan banyak anak pintar masuk sekolah yang kurang bermutu. Bahkan, anak-anak miskin yang pintar sering tertolak hanya karena sistem

zonasi ini,” ujar usai pertemuan dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/11).

Habib menyampaikan tiga opsi terkait keberlanjutan sistem PPDB berbasis zonasi: *pertama*, sistem zonasi tetap ada seperti saat ini, meski ada kekurangan; *kedua*, zonasi disempurnakan dengan beberapa perubahan; *ketiga*, zonasi dihapus sepenuhnya. Ia juga menambahkan, jika zonasi dihapus, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali apakah akan menggunakan sistem lama, seperti Ujian Nasional (UN), sebagai alat seleksi.

Selain sistem PPDB, Habib Syarief menyoroti implementasi Kurikulum Merdeka. Ia meminta pemerintah menjelaskan alat ukur keberhasilan kurikulum ini kepada masyarakat. “Banyak guru yang merasa keberatan. Dari 100 guru, paling hanya lima yang mendukung Kurikulum Merdeka. Sisanya mengeluh karena gaji kecil, beban administratif tinggi, dan masalah lain. Pemerintah harus mendengarkan keluhan ini,” ujar legislator dari Fraksi PKB itu. — qq/aha



BANYAK ANAK PINTAR MASUK SEKOLAH YANG KURANG BERMUTU. BAHKAN, ANAK-ANAK MISKIN YANG PINTAR SERING TERTOLAK HANYA KARENA SISTEM ZONASI INI

Habib Syarief Muhammad

Anggota Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Penanganan Risiko BPR di Jawa Barat



FOTO: EKI/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Shohibul Imam, menyoroti pentingnya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani risiko pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Shohibul mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya angka *Non-Performing Loan (NPL)* pada BPR di Jawa Barat, yang mencapai 11 persen.

“Angka NPL 11 persen ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Jangan sampai kita dengan mudah menyatakan BPR harus masuk ke status BDR (Bank Dalam Resolusi). Saya

ingin tahu, sejauh mana koordinasi antara LPS dan OJK terkait BPR yang berisiko ini? Apakah LPS sudah memiliki akses penuh terhadap data-data BPR tersebut?” ujar Shohibul saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat, Kamis (21/11).

Shohibul juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap OJK dan LPS sebagai regulator. Ia menyinggung survei literasi dan inklusi keuangan nasional yang dilakukan OJK, sambil mempertanyakan apakah aspek transaksi digital telah menjadi bagian dari survei tersebut.

“Apakah komponen terkait transaksi digital, seperti kripto, sudah dimasukkan dalam survei literasi keuangan? Jangan sampai kita melihat hasil survei literasi keuangan tinggi, tetapi ternyata aspek transaksi digital belum tersentuh. Padahal ini sangat penting di era sekarang,” jelas Shohibul.

Selain membahas sektor perbankan, Shohibul juga memberikan perhatian pada bursa karbon yang berada di bawah pengawasan OJK. Ia mengibaratkan bursa karbon sebagai pasar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat efektif dan efisien. Shohibul menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang akuntabel, inovatif, dan mendukung alokasi sumber daya secara optimal. **eki/aha**



PENTINGNYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP OJK DAN LPS SEBAGAI REGULATOR. IA MENYINGGUNG SURVEI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN NASIONAL YANG DILAKUKAN OJK

Shohibul Imam

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bapeten Perlu Maksimalkan Penyerapan Anggaran



FOTO: PRIMA

Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XII dengan Kepala Bapeten dan jajaran di Gedung Nusantara I.

Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyoroti realisasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang belum mencapai target per November 2024. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi anggaran hingga 19 November 2024 tercatat baru mencapai 79,2 persen.

Menurutnya, lambatnya penyerapan anggaran Bapeten ini menandakan adanya kemungkinan kendala dalam mengeksekusi program pemerintah. Ia pun mendorong agar Bapeten mengalokasikan penyerapan tahun 2024 ini untuk pemeliharaan alat di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan.

“Angka 79,2 persen itu kalau saya bagi dalam 11 bulan ini ya Pak, ya itu saya rata-ratakan sekitar 7,2 persen per bulan. Jadi kalau kita ambil sampai dengan akhir tahun 2024 itu sekitar 86,4 persen, artinya masih ada anggaran kurang lebih 20,8 persen yang harus diserap sampai akhir tahun 2024. Ini saya sarankan Pak kalau bisa tadi teman-teman juga sudah menyampaikan mungkin dialokasikan untuk penelitian dan perawatan alat-alat yang sudah rusak,” kata Nurwayah dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII dengan Kepala Bapeten dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan agar anggaran tidak boleh

hanya digunakan untuk kebutuhan rutin seperti gaji, tetapi harus ada perhatian khusus pada pemeliharaan alat-alat yang vital seperti yang ada di daerah Medan dan Belitung yang dilaporkan terdapat beberapa peralatan pengawasan yang rusak. Karena kerusakan alat ini menghambat kemampuan lembaga untuk pengawasan yang efektif.

“Ini menunjukkan perlunya alokasi anggaran yang lebih baik untuk pemeliharaan dan pembaharuan peralatan. Jadi jangan cuma untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terlalu penting, karena ini Bapeten perlu adanya inovasi-inovasi dan hal-hal yang membuat kegiatan ini lebih kelihatan maju ya dari segi penelitian,” tandasnya.

gal/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Peran BIG Atasi Perselisihan Tata Ruang Daerah



FOTO: MRP/PDT

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ke-3 tahun 2024 dan program strategis 2025, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menyoroti peran BIG dalam mengatasi perselisihan tata ruang yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Rokhmat menilai perselisihan yang terjadi kerap menjadi hambatan terhadap iklim investasi di suatu wilayah.



DI BEBERAPA KABUPATEN YANG ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF BELUM TERCAPAINYA SEBUAH KESEPAKATAN. MANA TATA RUANG YANG BUAT INDUSTRI, MANA YANG BUAT PERTANIAN. SEHINGGA INI MENJADI TUMPANG TINDIH. SEHINGGA INVESTOR TAKUT UNTUK INVESTASI. UJUNG-UJUNGNYA, AKHIRNYA INVESTOR KABUR.

Rokhmat Ardiyan

Anggota Komisi XII DPR RI

”Di beberapa kabupaten yang antara eksekutif dan legislatif belum tercapainya sebuah kesepakatan. Mana tata ruang yang buat industri, mana yang buat pertanian. Sehingga ini menjadi tumpang tindih. Sehingga investor takut untuk investasi. Ujung-ujungnya, akhirnya investor kabur. Nah, kehadiran geospasial ini untuk bisa menghadirkan data-data yang lebih lengkap,” kata Rokhmat dalam RDP Komisi XII di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berharap BIG bisa menyajikan data potensi-potensi sumber daya geotermal daerah serta dengan fungsinya dapat membantu memitigasi bencana. ”Baik minerba, kemudian minyak dan lain sebagainya. Ini supaya dibuka secara transparan. Apalagi Indonesia akan menuju energi baru terbarukan. Bagaimana potensi-potensi geothermal ini biar bermanfaat buat masyarakat,” sambungnya.

Untuk itu, dengan melihat pentingnya kinerja dari BIG, Legislator Dapil Jawa Barat X ini berharap adanya penambahan anggaran guna mendukung kerja-kerja BIG yang lebih efektif dan maksimal.  **we/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Diterima serta Dibahas Secara Dinamis & Demokratis



Ketua Panja RUU DKJ Imam Sukri saat memimpin Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara I.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) secara resmi diterima oleh Panitia Kerja (Panja) setelah melalui pembahasan intensif dan demokratis. Ketua Panja RUU DKJ Imam Sukri menyampaikan laporan hasil kerja Panja dengan menggarisbawahi poin-poin penting selama proses pembahasan RUU DKJ

“Setelah melalui pembahasan yang dinamis dan demokratis, Panja

menyatakan dapat menerima RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” ungkap Sukri saat menyampaikan laporan dalam dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Sebagai informasi, RUU ini memuat sejumlah perubahan krusial untuk menyesuaikan kedudukan Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara. Perubahan tersebut telah melalui serangkaian rapat dan mekanisme pembahasan RUU, termasuk daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 34 poin.

Selain itu, Politisi Fraksi PKB ini menyampaikan perubahan materi muatan RUU. Berupa penyisipan pasal baru yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Lalu, adanya perubahan nomenklatur jabatan berupa pengaturan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPR, dan anggota DPD daerah pemilihan Jakarta pasca Pemilu 2024. Terakhir, adanya penyempurnaan landasan hukum yakni penambahan ayat baru pada Pasal 22D guna mempertegas kedudukan daerah khusus Jakarta.

ums/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sepakati 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, RUU Perampasan Aset Prioritas Jangka Menengah



FOTO: ENO/PDT

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11) malam WIB.

Seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat untuk mengusulkan sebanyak 41 Rancangan Undang-undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat pleno pembahasan prolegnas

prioritas 2025 dan prolegnas jangka menengah 2025-2029.

"Apakah hasil penyusunan Prolegnas RUU 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025 dapat disetujui sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Bob Hasan saat memimpin rapat pleno yang dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11) malam WIB.

Dari sembilan fraksi yang setuju dalam rapat, terdapat tiga fraksi yang memberikan persetujuan dengan catatan. Ketiga fraksi itu, yakni PDI-Perjuangan, Golkar dan Demokrat. Di sisi lain, terdapat 178 RUU yang diusulkan Baleg untuk masuk ke dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset. **aha**



RUU Pengampunan Pajak Jadi Prioritas Prolegnas 2025

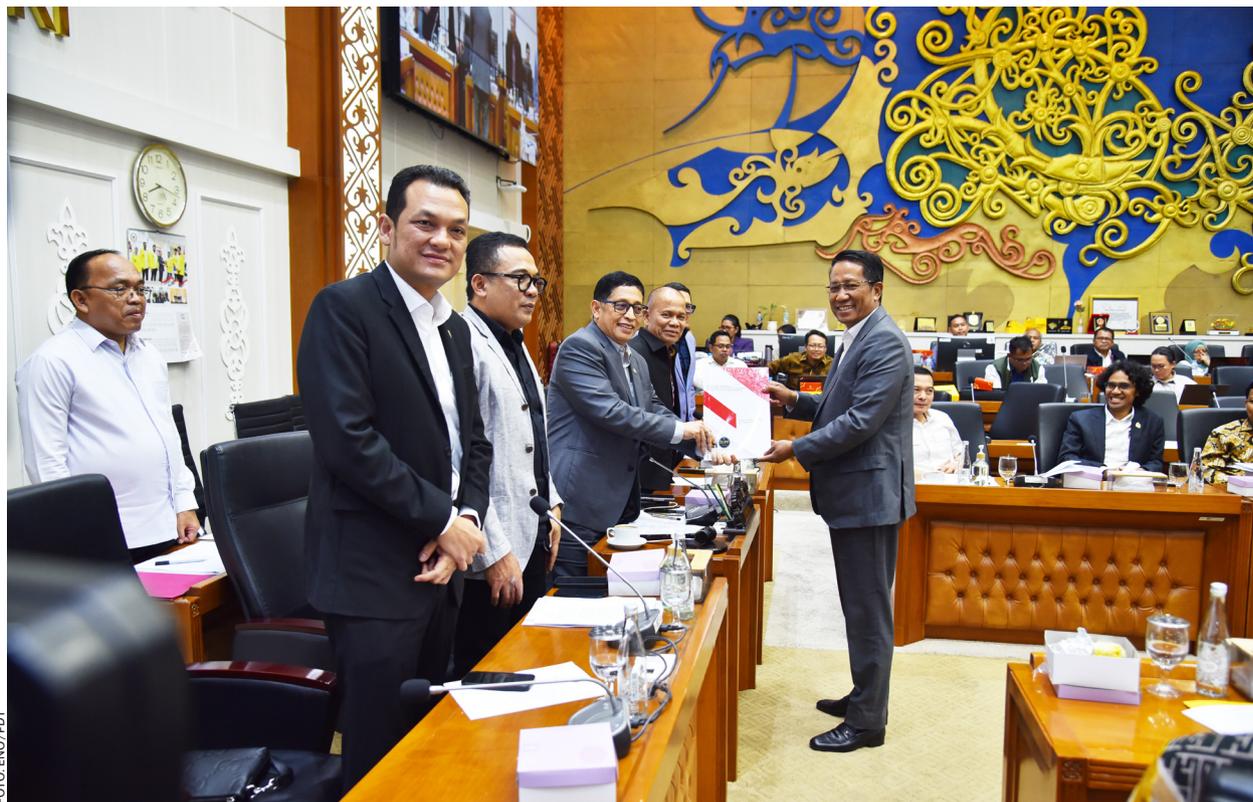


FOTO: ENO/PDT

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat menerima laporan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg DPR RI.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. RUU Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* awalnya usulan berasal dari Baleg, namun kemudian disepakati menjadi usulan Komisi XI DPR. Dengan demikian, naskah akademik dan draf RUU disiapkan oleh Komisi XI DPR.

“Komisi XI mengajukan dalam surat tersebut, mengajukan usulan prolegnas prioritas tahun 2025 sebelumnya ada RUU yang diajukan di-drop, kemudian diganti RUU

Pengampunan Pajak. Yang dari Baleg kita *drop*,” Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam rapat kerja Baleg DPR RI di Jakarta, Senin malam (18/11).

Sebagai gambaran kembali, RUU *Tax Amnesty* ini awalnya menjadi usulan Baleg dalam draf Prolegnas Prioritas 2025. Namun, dalam rapat Panja muncul usulan dari beberapa anggota Baleg agar RUU tersebut menjadi inisiatif pemerintah.

Sebelumnya, ada 4 RUU yang diajukan Komisi XI DPR, yakni RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (disetujui panja), RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, RUU tentang Penghapusan Piutang Negara, dan

RUU tentang Ekonomi Syariah. Dengan masuknya RUU Pengampunan Pajak sebagai usulan atau inisiatif Komisi XI, maka keempat RUU itu batal masuk prolegnas prioritas 2025.

Baleg menerima surat dari Komisi XI Nomor B/14608/LG.01.01/11/2024 tertanggal 18 November 2024 dan berisi persetujuan usulan. “Yang intinya menyetujui usulan penambahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak agar dimasukkan ke dalam prolegnas ruu prioritas tahun 2025,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan saat membacakan laporan panja.

— hal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Soroti Urgensi RUU Pangan saat Serap Aspirasi di Lampung



FOTO: AIS/PDT

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mukhlis Basri, saat mengikuti Kunspek Baleg DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Lampung.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mukhlis Basri, menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyerapan aspirasi di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, terutama terkait pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang pangan, pendidikan, dan lalu lintas. Dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Lampung juga menekankan perlunya pembentukan undang-undang terkait ketahanan pangan guna menghadapi tantangan distribusi pangan di wilayah tersebut.

“Seperti yang kami dengar dalam diskusi, salah satu topik utama yang diangkat adalah RUU Perubahan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RUU ini sangat penting untuk memberikan kepastian dalam pengaturan dan distribusi pangan di Lampung, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Mukhlis Basri.

Selain isu pangan, Mukhlis juga menyoroti urgensi RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu fokus pembahasan. Ia mengungkapkan bahwa di sektor pendidikan, diperlukan landasan hukum yang jelas untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pendidikan di Lampung.

“Undang-Undang Pendidikan harus segera disahkan. Pembagian anggaran dan implementasi program pendidikan yang terbagi dalam tiga komponen memerlukan dasar hukum

yang kuat. Tanpa adanya undang-undang yang memadai, program pendidikan di Lampung sulit berjalan optimal,” jelas Mukhlis.

Lebih lanjut, Mukhlis Basri menekankan pentingnya pembaruan legislasi terkait lalu lintas, mengingat posisi strategis Lampung sebagai jalur utama kendaraan yang melintasi Sumatera. Ia menyebutkan bahwa pengaturan lalu lintas di provinsi ini perlu perhatian khusus untuk mengatasi kepadatan dan risiko kecelakaan. — **ais/aha**



RUU INI SANGAT PENTING UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN DALAM PENGATURAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DI LAMPUNG

Mukhlis Basri

Anggota Baleg DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Potensi Kekayaan Sulawesi Tenggara Belum Tergarap Maksimal

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) namun belum tergarap maksimal, terutama dalam hal pemasukan pajak daerah. Ia menilai salah satu permasalahan utama terletak pada pengelolaan pajak air permukaan yang memiliki

peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Pasal 30 ayat 5, hubungan keuangan antara pusat dan provinsi harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Selatan, pajak air permukaan pada pembangkit listrik dikenakan sekitar 10 rupiah per KWH. Meskipun nilainya kecil, jika

menghasilkan satu miliar KWH per bulan, pendapatan bisa mencapai 10 miliar rupiah. Potensi seperti ini perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” ujar La Tinro saat ditemui di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (13/11).

Lebih lanjut, La Tinro juga membahas pemanfaatan aspal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, meskipun daerah ini mampu menghasilkan aspal berkualitas baik, pemanfaatannya belum optimal baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Saya melihat ada dua masalah utama: pertama, apakah spesifikasi aspal yang dihasilkan sudah memenuhi syarat standar nasional? Kedua, apakah volume produksi dan pemanfaatannya sudah mencukupi? Berdasarkan penjelasan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, potensi aspal ini belum dimaksimalkan sepenuhnya,” kata Politisi Partai Gerindra tersebut.

— dip/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, saat mengikuti kunspek Baleg DPR di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (13/11/2024).

Perjuangkan Aspirasi dari Kalimantan Barat



FOTO: MAN/PDT

Anggota Baleg DPR RI Edi Oloan Pasaribu saat pertemuan dengan Pemprov Kalbar, DPRD Kalbar, Akademisi juga Masyarakat hukum adat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (14/11/2024).

Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Legislasi ke Pontianak, Kalimantan Barat, terkait dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas selama lima tahun mendatang. Anggota Baleg DPR RI Edi Oloan Pasaribu menjelaskan bahwa Kunjungan Kerja ini untuk menyerap aspirasi atau masukan dari Pemprov Kalbar dan masyarakat.

“Kita melakukan kunjungan ke sini untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi dari daerah mendengarkan usulan-usulan dari Pemprov apa yang menjadi urgent RUU yang mereka usulkan,” kata Edi dalam kunjungan spesifik di Kantor Gubernur Kalbar,

Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (14/11).

Edi Oloan Pasaribu mengungkapkan dalam pertemuan tersebut muncul beberapa masukan undang-undang, diantaranya undang-undang mengenai masyarakat adat. Hal itu, menurutnya, sangat baik untuk melindungi lingkungan dari adanya investasi. Oleh karena, tambahnya, perusahaan memiliki perspektif sendiri dalam melihat hutan atau lingkungan sebagai komoditas. “Tetapi, masyarakat adat ini itu sebuah tempat kehidupan mereka yang mereka sudah bergantung sudah dari turun temurun itu menjadi sumber kehidupan mereka,” jelas Politisi Fraksi PAN itu.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap soal isu perbatasan di beberapa titik antara Kalimantan Barat dengan Malaysia, agar menjadi objek wisata. Menurut Pemprov Kalbar, hal ini sudah pernah diusulkan kepada Baleg di periode DPR RI sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan perbatasan karena sangat strategis. — man/rdn



MASYARAKAT ADAT INI ITU SEBUAH TEMPAT KEHIDUPAN MEREKA YANG MEREKA SUDAH BERGANTUNG SUDAH DARI TURUN TEMURUN ITU MENJADI SUMBER KEHIDUPAN MEREKA

Edi Oloan Pasaribu

Anggota Baleg DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung Sulteng Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan



FOTO: OJI/PDT

Ketua Tim Kunjuran Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said, saat memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulteng, bupati/wali kota, dan perwakilan Bank Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah.

Ketua Tim Kunjuran Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhidin Mohamad Said, menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Kunjungan ini sangat tepat untuk memastikan proses pembangunan di Sulawesi Tengah berjalan optimal. Selain itu, kami ingin memastikan penyerapan dana pembangunan, yang bersumber dari transfer ke daerah, dilakukan secara efektif dan efisien guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah

pusat dan mengatasi ketimpangan antar wilayah,” ujar Muhidin dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (21/11).

Wakil Ketua Banggar DPR RI itu juga menyampaikan, kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh informasi terkait pengendalian inflasi dan kebijakan perpajakan yang telah diterapkan di Provinsi Sulteng. “Sulawesi Tengah memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Pemerintah perlu merealisasikan langkah-langkah mitigasi risiko ini, yang tidak hanya

berdampak pada perekonomian tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Muhidin juga menjelaskan bahwa pemilihan Sulawesi Tengah sebagai lokasi kunjungan kerja tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah ini, termasuk sektor pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, wisata bahari, dan wisata sejarah.

Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menyumbang 52 persen dari cadangan global, atau sekitar 72 juta ton nikel. **oji/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bali Urban Subway Jangan Sampai Beban APBN



FOTO: SHIN/PDT

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Anggaran DPR RI dipimpin Wihadi Wiyanto, saat foto bersama usai pertemuan dengan Pemprov Bali di Denpasar.

Provinsi Bali serius merealisasikan proyek *Bali Urban Subway*, yang diklaim sepenuhnya akan dibiayai oleh investor tanpa melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa pendanaan proyek ini tidak akan membebani keuangan negara maupun daerah.

Namun, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali untuk berhati-hati dalam pengelolaan pendanaan dengan investor. "Tadi disampaikan bahwa MRT (*Bali Urban Subway*) ini akan dibangun tanpa memakai dana APBD maupun APBN, dan murni dari investor. Maka kami mengingatkan, jangan sampai nanti di tengah jalan, jika

investor tidak mampu menyelesaikan proyek, akhirnya menjadi beban APBN," ujar Wihadi usai pertemuan dengan Pemprov Bali di Denpasar, Kamis (21/11).

Wihadi juga menyoroti pentingnya memastikan kejelasan dan ketelitian dalam setiap perjanjian pendanaan dengan investor. Hal ini untuk mencegah potensi kerugian yang dapat timbul, seperti proyek yang

terhenti karena kekurangan dana atau konflik kontrak.

Meski demikian, Banggar DPR RI menyambut baik proyek *Bali Urban Subway* yang diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah kemacetan di Bali. Proyek ini dinilai strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.

— syn/aha



JANGAN SAMPAI NANTI DI TENGAH JALAN, JIKA INVESTOR TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN PROYEK, AKHIRNYA MENJADI BEBAN APBN

Wihadi Wiyanto

Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Dorong Peningkatan Pelayanan Bandara Juanda



FOTO: ENO/PDT

Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurniawati, dalam foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurniawati mendorong peningkatan pelayanan di Bandara Internasional Juanda. Menurutnya, pelayanan prima akan memastikan seluruh pengguna layanan bandara, termasuk masyarakat umum, merasakan kenyamanan dan kemudahan.

“Kami tadi sudah berdiskusi dengan seluruh pejabat di Bandara Juanda. Diharapkan bandara ini dapat menjadi Bandara Internasional yang semakin prima dalam pelayanannya. Selain itu, sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan, bukan hanya

untuk Anggota Dewan, tetapi terutama untuk masyarakat yang menggunakan Bandara Juanda,” jelas Indah usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/11).

Politisi Fraksi PDIP tersebut berharap agar Bandara Internasional Juanda mampu memastikan ketepatan jadwal keberangkatan pesawat serta menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

“Mari kita dukung Bandara Juanda agar kedepannya semakin baik pelayanannya. Bandara ini juga bisa menjadi ruang untuk mempromosikan produk-produk UMKM sebagai bentuk

dukungan terhadap produk dalam negeri. Selain itu, kami harapkan jadwal penerbangannya semakin tepat waktu. Semoga semuanya semakin sukses, istimewa, dan luar biasa,” ungkap Indah.

Kunjungan Kerja BURT DPR RI merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan DPR guna memastikan pelayanan keprotokolan bandara telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 101 Ayat (3) huruf c, yang menyatakan bahwa BURT dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e. **eno/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kedutaan Korsel Dukung Seluruh Program Pemerintahan Presiden Prabowo



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dalam foto bersama usai ikut menerima kunjungan kehormatan dari Charge d'Affaires Kedutaan Besar Korea Selatan, HE Mr. Park Soo-deo di Ruang Delegasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menerima kunjungan kehormatan dari Charge d'Affaires Kedutaan Besar Korea Selatan, HE Mr. Park Soo-deo, pada Selasa (19/11). Pertemuan tersebut membahas berbagai potensi kerjasama strategis serta komitmen Pemerintah Korea Selatan dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan tersebut mencakup program mahasiswa gratis, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), percepatan pembangunan infrastruktur, serta capacity building di berbagai bidang," ungkap Dave dalam wawancaranya dengan Parlementaria di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, Dave menegaskan pentingnya percepatan proses persetujuan dari DPR RI terkait *agreement* agar Duta Besar Korea Selatan yang baru segera dapat

bertugas di Indonesia.

Selain itu, kerja sama bilateral lainnya juga menjadi topik pembahasan, meliputi pembangunan industri, kerja sama di sektor pariwisata, budaya, serta pengembangan kapasitas di berbagai sektor.

"Kami membahas hal-hal ini dengan keyakinan bahwa hubungan dan kedekatan antara Indonesia dan Korea Selatan akan terus terbangun serta semakin erat kedepannya," tutup legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut. — pun/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Jajaki Kolaborasi Ekonomi Hijau dan Biru RI - Tiongkok

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Republik Indonesia, (H.E) Wang Lutong. Pada pertemuan ini dibahas beberapa hal antara lain hilirisasi mineral, ekonomi biru, pariwisata hingga menyinggung program makan bergizi gratis.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra

Airlangga menjelaskan terkait dengan hilirisasi mineral, fokus yang dibahas adalah kolaborasi di sektor *green mineral* yang mencakup hilirisasi mineral dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

"*Blue economy* itu adalah ekonomi maritim termasuk dari budidaya, di mana mereka memiliki *coastline* yang lebih sedikit dari Indonesia namun memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Jadi kita ingin meningkatkan produktivitas untuk budidaya kita

kemudian ini termasuk *eco culture*, *seafood processing*, *tourism*, maritim dan transportasi. Mereka berharap *partnership* ini terus dilanjutkan dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara kita," tuturnya usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11)

Ravindra menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Duta Besar Tiongkok menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari Tiongkok ke Indonesia. Pada tahun 2023 lalu diperkirakan ada 700.000 wisatawan mancanegara asal negeri tirai bambu dan hingga pertengahan tahun ini telah tercatat telah ada 550.000 pelancong dari Tiongkok yang datang ke tanah air.

Ravindra menyampaikan bahwa menurut Dubes Tiongkok, Indonesia merupakan mitra strategis yang sangat penting bagi negara tersebut dan begitupun sebaliknya.



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga mendampingi Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, saat menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Republik Indonesia, (H.E) Wang Lutong.

FOTO: RSE/PDT

Usulkan Sosialisasi Peraturan Etika bagi Anggota DPR Baru



FOTO: PRIMA

Anggota MKD DPR RI, Adang Daradjatun, saat mengikuti Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polres Metro Depok, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024).

tentang etika, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Adang saat mengikuti Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polres Metro Depok, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa sosialisasi tersebut penting agar para anggota baru memahami dengan jelas aturan etika yang berlaku dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. “Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan etika ini, diharapkan para anggota DPR dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari potensi pelanggaran etika,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Adang berharap Ketua MKD DPR RI segera menyusun jadwal sosialisasi sehingga para anggota baru dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lembaga legislatif ini.

pdt/aha

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya sosialisasi mengenai peraturan etika kepada anggota DPR yang baru. Menurutnya, masih banyak anggota baru yang belum sepenuhnya memahami keputusan dan peraturan DPR RI terkait etika yang harus dipatuhi.

“Saya memahami bahwa ada banyak anggota baru yang mungkin belum familiar dengan peraturan ini. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua MKD bahwa perlu diadakan sosialisasi mengenai Peraturan DPR RI Nomor 1 dan 2, yang mengatur



SOSIALISASI TERSEBUT PENTING AGAR PARA ANGGOTA BARU MEMAHAMI DENGAN JELAS ATURAN ETIKA YANG BERLAKU DALAM MENJALANKAN TUGAS MEREKA SEBAGAI WAKIL RAKYAT.



Adang Daradjatun

Anggota MKD DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



MKD Dorong Kolaborasi, Tindak Plat Palsu DPR



FOTO: NDN/PDT

Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, saat kunjungan kerja ke Polres Bogor, Jawa Barat.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polres Bogor, Jawa Barat, dengan salah satu agenda utama membahas maraknya penggunaan plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI palsu.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, mendorong adanya kolaborasi antara pihaknya dengan Polres Bogor untuk menangani peredaran plat palsu tersebut. Agung meminta agar Polres Bogor menindak

tegas pelaku pemalsuan TNKB, namun tetap mengutamakan langkah preventif sebagai pendekatan awal.

“Kami sadar bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Namun, penting juga untuk mendahulukan tindakan preventif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kode-kode khusus pada plat nomor DPR,” ujar Agung usai agenda Kunker, Kamis (21/11).

Ia juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk berkoordinasi dengan MKD DPR RI saat menemukan indikasi pelat DPR RI palsu. Menurutnya, MKD

memiliki sistem kode penomoran khusus yang dapat mempermudah proses verifikasi.

“Kami memiliki kode penomoran khusus terkait nomor anggota, fraksi, maupun lembaga pimpinan alat kelengkapan dewan. Oleh karena itu, penting untuk mensinergikan upaya ini dengan Polres Bogor,” jelas Politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Kepala Polres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, menyambut baik kunjungan MKD dan menegaskan komitmen pihaknya untuk berkolaborasi dalam menindak kasus plat palsu DPR RI. **ndn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa di Rakor KPA 2024



FOTO: TVR/PDT

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, saat menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (Rakor KPA) Tahun 2024 di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian integral dari pengelolaan anggaran pada Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (Rakor KPA) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (18/11).

Indra menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan memiliki dampak strategis terhadap efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. "Pengadaan barang dan jasa adalah bagian penting dalam

tata kelola anggaran. Ke depan, ada empat hal yang menjadi perhatian utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, serta pengawasan," tegas Indra.

Dalam sesi penyampaian materi, Indra menyoroti pentingnya proses perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, perencanaan yang baik harus dimulai jauh sebelum tahun anggaran berjalan. "Proses perencanaan pengadaan barang dan jasa seharusnya sudah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun lima tahun sebelumnya. Dalam penyusunan Renstra, kita perlu melibatkan semua unit kerja

untuk menyusun visi besar dan rencana jangka panjang," jelasnya.

Indra juga menekankan bahwa perencanaan yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan kolaboratif. "Hal ini penting agar tidak ada program atau kebutuhan pengadaan yang terlewat, sehingga dapat meminimalisir potensi masalah di kemudian hari," tambahnya.

Selain perencanaan yang matang, Indra juga menyoroti pentingnya sinkronisasi akun belanja dalam proses pengadaan. Ia menjelaskan bahwa sinkronisasi ini merupakan langkah vital untuk menghindari temuan audit yang berpotensi mengganggu opini laporan keuangan. **aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Optimalkan Partisipasi Masyarakat, Sediakan Data dan Informasi

kerja sama Penelitian, Kajian, dan Kegiatan Akademik lainnya yang diperlukan.

“Kerja sama ini bagian dari upaya kami dalam membangun kemitraan dengan *stakeholders* dalam pembentukan Undang-Undang, kami memandang bahwa WFD merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyediaan data dan informasi, peningkatan kapasitas tenaga fungsional, pengkajian dan penelitian,” demikian dikatakan Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul pada acara seminar dengan tema ‘partisipasi publik bermakna dalam legalitas.’ Jakarta, Rabu (20/11).

Sensi menambahkan, dengan terselenggaranya seminar, dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam penyusunan pedoman Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI.

“Selama ini Badan Keahlian DPR RI telah melakukan kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang melalui konsultasi publik baik secara luring maupun daring, kegiatan konsultasi publik antara lain diskusi dengan *stakeholder* terkait dan pakar serta akademisi,” tutupnya.

afr/rdn



Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul (kiri) usai menandatangani Nota Kesepahaman Badan Keahlian DPR RI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

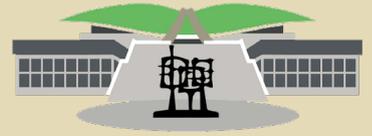
Badan Keahlian (BK) DPR RI yang merupakan *supporting system* bagi DPR RI, berperan memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi.

Dengan adanya dukungan keahlian yang diberikan pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI maka Badan Keahlian DPR RI bersama *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan tujuan untuk meningkatkan



Scan QR untuk berita selengkapnya





Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, bersama tim kunspek Komisi VIII DPR RI saat memberikan beberapa bantuan sosial di Bandung Barat.
FOTO:AZK/AHA



Scan QR untuk berita selengkapnya